

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya suatu kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2¹, yang menyatakan :

“Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1², yang menyatakan :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk; dan
- e) Keterangan terdakwa.”

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1) KUHAP, menyatakan : Bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Sedangkan untuk permintaan bantuan tenaga keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke 28 KUHAP, yang menyatakan:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Kasus-kasus tindak pidana/pelanggaran seperti pembunuhan penganiayaan, perkosaan dan kecelakaan lalu lintas merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli *forensic* atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yang salah satunya adalah pada pengungkapan kasus korban kecelakaan lalu lintas. Kasus korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka yang diantaranya adalah luka ringan, luka sedang dan luka berat seseorang, dimana dilakukan suatu pelanggaran lalu lintas dalam bentuk kecelakaan lalu lintas membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter

yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat di pertanggungjawabkan mengenai korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda luka pada korban kecelakaan lalu lintas.

Melihat tingkat perkembangan kasus kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan pelanggaran lalu lintas telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas pelanggaran lalu lintas, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus berbagai kecelakaan lalu lintas.

Dari data Kementerian Perhubungan mencatat, bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011 sangat meningkat tajam dari tahun 2010 sebesar 198 persen. Dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas menyebabkan pula meningkatnya angka korban jiwa. Jika tahun 2010 tercatat korban tewas mencapai 144 orang, sedangkan di tahun 2011 korban tewas tercatat 345 orang. Ini berarti korban tewas meningkat 140 persen dibanding tahun 2010. Tak hanya korban tewas, korban luka tercatat meningkat tajam dari tahun 2010. Jika 2010 jumlah korban luka berat mencapai 198 orang, tahun 2011 sudah mencapai 564 orang.³

Dari data yang dihimpun kepolisian, penyebab kecelakaan yang paling banyak adalah karena berboncengan lebih dari satu orang. Pada tahun 2010, kecelakaan karena faktor ini berjumlah 99 orang dan tahun 2011 berjumlah 104 orang. Peringkat kedua adalah karena mengantuk, pada tahun 2010 mencapai 49 orang dan 2011 sebanyak 88 orang. Kelaikan kendaraan juga tidak boleh dianggap

³ *Jumlah Kecelakaan 2011 Meningkat 198%*. <http://www.belibu.com/jumlah-kecelakaan-2011-meningkat-198-rubrik-325>, diakses pada tanggal 2 Februari 2012

remeh. Pada tahun 2010, faktor ini menyebabkan 35 kasus kecelakaan, sedangkan di tahun 2011 sebanyak 32 kasus.⁴

Dari kualitas pelanggaran kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dengan semakin kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat tentang mematuhi peraturan lalu lintas. Kesadaran dan ketaatan masyarakat yang kurang inilah telah dibuktikannya semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Dengan demikian masyarakat patuh hukum merupakan satu ciri khas masyarakat madani, sekaligus sebagai perwujudan dari supremasi hukum, digambarkan sebagai suatu masyarakat yang menerima hukum sebagai aturan, ketentuan, kesepakatan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta menerapkan sebagai pedoman dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.⁵

Mengungkap suatu kasus kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang terjadi, berupaya membuat terang terhadap pelanggaran kecelakaan lalu lintas tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban kecelakaan lalu lintas, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa.

⁴ *Ibid*

⁵ Bima Anggarasena, 2010, "*Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*" Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, hal. 28

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Menurut pengertiannya, *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap orang atau yang diduga orang, berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁶

Dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas oleh pihak kepolisian telah menunjukkan betapa sering peranan *Visum et Repertum*. Sebuah surat kabar memuat berita mengenai kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah hukum Polres Ngawi dan dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini merenggut nyawa dari seorang artis yang bernama Sophan Sophian.⁷

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur Kombes Pol. Condro Kirono menyatakan sembilan saksi yang sudah diperiksa polisi menyebutkan bahwa Sophan Sophian tidak meninggal dunia karena ditabrak, melainkan kecelakaan tunggal saat tur “Jalur Merah Putih.”⁸

Dalam kesempatan itu, Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Eny Mardiasari menambahkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit (RS) Sragen menyebutkan almarhum mengalami luka memar dan lebam serta patah tulang di bagian rusuk. “Tapi hal itu belum bisa dikatakan karena ditabrak, karena luka-luka seperti itu

⁶ Wely Wahyura, “*Visum et Repertum*”. <http://welywahyura.wordpress.com/visum-et-repertum/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2011

⁷ Sophan Sophian Tidak Ditabrak Melainkan Kecelakaan Tunggal. <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/04/2211140/dirlantas.polda.jatim.sophan.sophian.tidak.ditabrak>, diakses pada tanggal 4 Desember 2011

⁸ *Ibid*

dapat diakibatkan beberapa sebab, bisa karena ditabrak, tapi bisa juga karena tertindih moge yang dikendarai”, katanya. Setelah kejadian, katanya pihaknya memantau TKP dan menemukan di lokasi kejadian ada lubang di bahu jalan yang lebarnya 40 cm dan panjangnya 90 cm.⁹

Dengan seperti kasus tersebut alangkah *Visum et Repertum* ini sangat diperlukan untuk mengetahui dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas yang demikian, tentunya pihak kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *Visum et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Peranan dan Keabsahan *Visum et Repertum* Dalam Proses Penyidikan pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas.”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas ?

⁹ *Ibid*

2. Bagaimana keabsahan proses penyidikan, apabila penyidik tidak melakukan *Visum et Repertum* pada korban kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui keabsahan proses penyidikan, apabila penyidik tidak melakukan *Visum et Repertum* pada korban kecelakaan lalu lintas, dalam tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya yaitu ilmu kedokteran. Kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam

tugasnya menemukan kebenaran materiil tersebut. Disamping itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya penggunaan bantuan tenaga ahli yang dalam hal ini adalah dokter pembuat *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan koreksi untuk menyempurnakan dan pengembangan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk *Visum et Repertum* dibidang kedokteran terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat merenggut korban jiwa. Khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya pidana dengan bidang ilmu lainnya, yaitu kedokteran, kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil.
- b. Bagi pemerintah, agar dapat menjadi bahan masukan di dalam menyusun/merumuskan peraturan dan sekaligus kebijakan yang menyangkut perlindungan korban kecelakaan lalu lintas dengan

disertainya *Visum et Repertum* agar nantinya mendapatkan kebenaran materiil sehingga akan melahirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat luas.

- c. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penggunaan *Visum et Repertum* bagi kepentingan penyidikan untuk mengungkap suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode merupakan hal yang begitu kompleks dalam rangka mencari dan memperoleh data/bahan hukum yang akurat yang mana pada nantinya metode tersebut akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data yang diperoleh. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian (*Research Approach*)

Metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah kedudukan, peranan dan proses *Visum et Repertum* dalam proses penyidikan khususnya pada korban kecelakaan lalu lintas, dari segi ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan serta mengaitkan dengan realitas yang ada di dalam implementasinya. Dari data Polresta Malang,

hingga minggu terakhir 2014 jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 190 kejadian dengan jumlah korban meninggal 56 orang. Di tahun 2013, jumlah kecelakaan mencapai 222 kejadian dengan meninggalnya 70 orang.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor unit laka lantas Polres Malang yang beralamatkan di Jalan Dr. Cipto No. 6 Malang, penelitian di lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, karena penulis mengamati pada tanggal 13 Agustus 2011 hingga 5 September 2011, penulis menemukan kondisi korban kecelakaan lalu lintas yang tidak mendapatkan suatu bantuan hukum dalam hal *Visum et Repertum* si korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dalam melakukan proses penyidikan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari perundang-undangan (misalnya : KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

¹⁰ Angka Kecelakaan di Malang Turun, <http://surabaya.tribunnews.com/2014/12/13/angka-kecelakaan-di-malang-turun>, diakses pada tanggal 4 Desember 2014

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan) dan penelitian di lapangan serta penelitian hasil wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yakni pihak yang berwenang dalam proses penyidikan dan korban kecelakaan lalu lintas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan serta mengumpulkan beberapa keterangan atau fakta secara langsung melalui referensi buku-buku, hasil penelitian dan internet yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian yang menjadi objek permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian *yuridis-sosiologis* ini, untuk memperoleh data di lapangan maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara atau interview

Yaitu melakukan wawancara langsung kepada responden yang mana dalam hal ini adalah anggota Kepolisian Resort Kota Malang unit laka yang bernama Briptu Danar Bayu Baskara yang bertanggung jawab dalam juru bicara unit laka-lantas dan saudara Deny Nurdiansyah beserta keluarga selaku salah satu korban kecelakaan lalu lintas.

b. Studi dokumentasi

Disamping menggunakan wawancara serta Tanya jawab, peneliti juga menggunakan metode studi dokumen yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen antara lain berupa data mekanisme penyidikan laka lantas, data jumlah laka pada tahun 2011, data penyelesaian perkara tahun 2011 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta data pendukung lainnya terdapat dalam lampiran yang dimiliki oleh para pihak di lokasi penelitian dalam hal berkenaan dengan proses penelitian terhadap penulisan hukum yang diamati dan diselidiki dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen berupa arsip dari kantor unit laka-lantas Polresta Malang.

c. Studi kepustakaan

Pada tahap penelitian ini juga memakai cara dengan menelusuri dari berbagai macam buku-buku, skripsi dan thesis. Karena dengan melalui tahap ini studi kepustakaan sangat diperlukan sebagai instrumen pendukung untuk menganalisa data yang sangat penting.

5. Analisa Data

Pada tahapan ini data dan dokumen-dokumen yang berhasil didapatkan yang kemudian akan dianalisis serta disusun secara berurutan (sistematis) sehingga dari data yang diperoleh dan akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, dengan cara menggambarkan hasil dari pada studi lapangan, hasil dokumentasi dan hasil pustaka, kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa untuk menjawab dari

permasalahan. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan penegasan suatu konsep serta gejala-gejala dengan menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan subjek dari penelitian.

Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai obyek penelitian. Disini digunakan metode *deskriptif analisis*, dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan berupa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara lisan dan pelaku – pelaku nyata, untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta dianalisa untuk memperoleh jawaban maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan secara logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan yang menyangkut obyek penelitian.

Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹ Di pihak lain, analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai berikut :

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

¹¹ Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- b. Mengumpulkan, memilah – milah, mengklasifikasikan, mentesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan – hubungan, dan membuat temuan – temuan umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun secara berurutan (sistematis) sehingga pada nantinya dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Dalam hal ini adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pemaparan yang terdapat dalam bab ini terdiri dari pengertian penyidikan, fungsi penyidikan, tugas dan wewenang pejabat penyidik, penyidik pembantu, pengertian *Visum et Repertum*, tujuan *Visum et Repertum*, macam-macam *Visum et Repertum*, korban menurut teori, korban menurut undang-undang, korban kejahatan, hak-hak korban, pengertian lalu lintas, pengertian polisi lalu lintas, tugas polisi lalu lintas, fungsi polisi lalu lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan melakukan secara spesifik dan substantif mengenai permasalahan yang telah ada dalam penelitian ini yakni mengenai *Pertama*, bagaimanakah peranan *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas dan yang *kedua*, bagaimana keabsahan proses penyidikan, apabila penyidik tidak melakukan *Visum et Repertum* pada korban kecelakaan lalulintas.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan penutup yang mana meliputi kesimpulan dan saran/ rekomendasi. Kesimpulan berupa uraian mengenai hal-hal yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Saran/ rekomendasi berupa penyampaian atau masukan yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yang mana berisikan tentang uraian dari hasil kesimpulan.